

BAB I

PENDAHULUAN

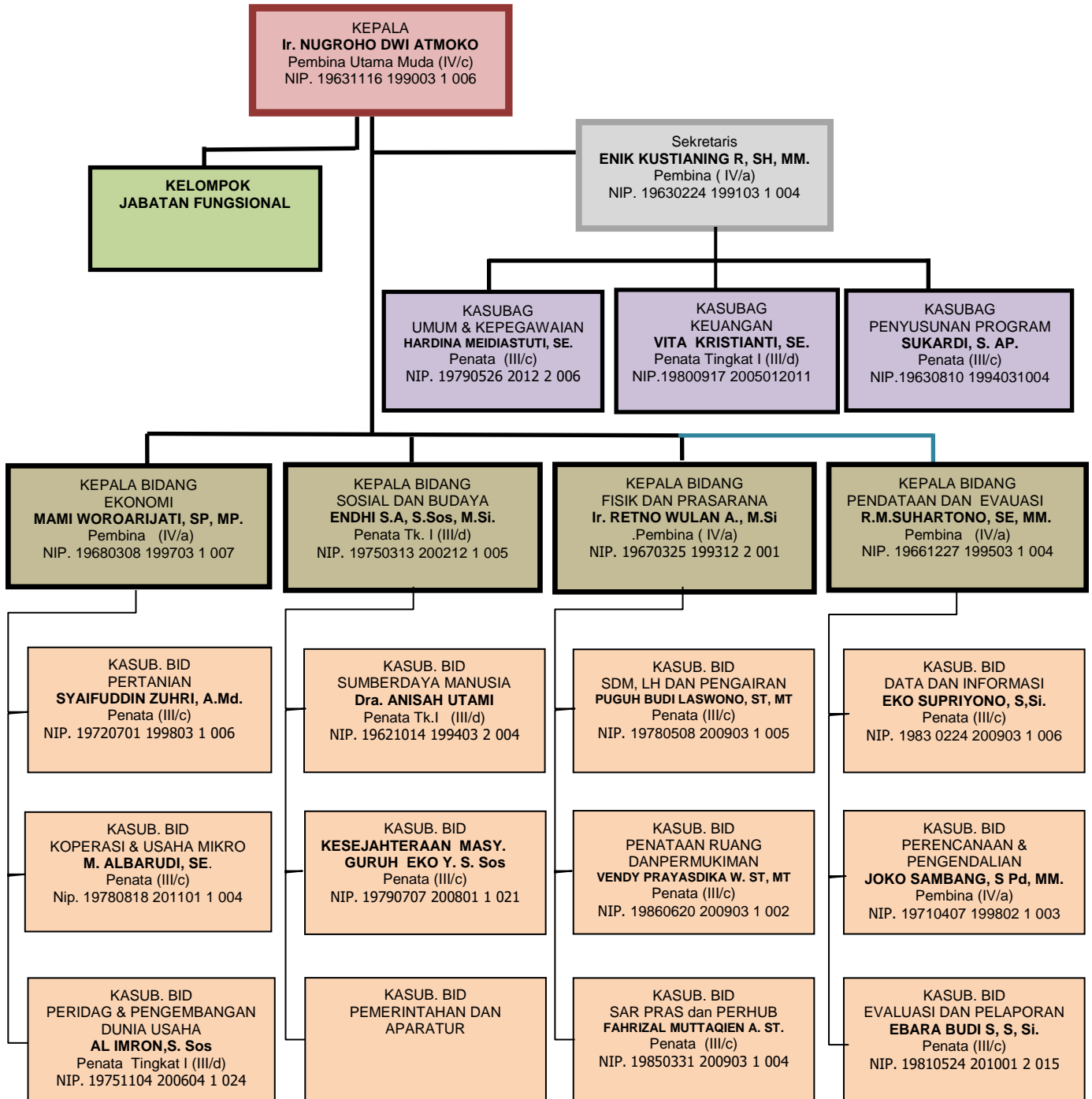
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 dan telah diubah menjadi Peraturan (apabila ada perubahan) Deraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan evaluasi pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN JABATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERDA KABUPATEN LUMAJANG NO. 82 TAHUN 2016 TGL : 29 SEPTEMBER 2016



1. Susunan Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Pertanian
 2. Sub. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
 3. Sub. Bidang Perindag. dan Pengembangan Dunia Usaha
- d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Sumber Daya Manusia
 2. Sub. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
 3. Sub. Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan
 2. Sub. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman
 3. Sarana, Prasarana dan Permukiman
- f. Bidang Data dan Informaasi terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Data dan Informasi
 2. Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada Tahun 2016

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan disertai perubahan budaya kerja pada seluruh Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	65	63,89	98,30
	Persentase kesesuaian prog. pada Renstra OPD terhadap prog. RPJMD	100	100	100
	Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir di dalam APBD	80	83,70	104,60
	Persentase OPD dengan capaian program minimal 85%	100	100	100

Tabel 2.2
Cost per outcome Kepala Bappeda Tahun 2018

No	SARARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	65 %	63,89%	98,30%	8.742.652.000	7.869.890.551	90,02
		Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir di dalam APBD	80 %	83,70%	104,60%			
		Persentase kesesuaian program pada renstra SKPD terhadap program RPJMD	100%	100%	100%			
		Persentase OPD dengan Capaian program Minimal 85 %	100%	100%	100%			

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Organisasi dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman evaluasi yang mana didalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2018, jumlah alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang sebesar Rp.10.741.804.454,- terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang dikelola Oleh Badan Perencanaan pembangunan Daerah kabupaten Lumajang, sedangkan Belanja Langsung terdiri (program/kegiatan) sebesar Rp. 8.742.652,-. Dari total anggaran tersebut sampai pada Semester II Realisasi terakhir sebesar Rp. 7.869.890.551,- atau sebesar 90,02 % secara detil penyerapan anggaran tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut:

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	<i>BELANJA LANGSUNG</i>			
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.578.726.000	1.473.336.455	93,32
a	Pelayanan Admiistrasi Perkantoran	1.578.726.000	1.473.336.455	93,32
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	516.806.000	360.213.772	69,70
a	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Aparatur	208.228.000	133.190.000	63,95
b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	308.518.000	227.023.772	73,59
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CANPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	43.000.000	36.350.504	84,54
a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	5.000.000	2.619.000	52,38
b	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000	1.975.000	98,75
c	Penyusunan Rencana Kerja	2.000.000	1.845.000	92,25
d	Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran OPD	34.000.000	29.911.504	87,98

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	729.500.000	715.026.875	98,02
a	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	125.000.000	121.325.000	97,06
b	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan	40.000.000	32.450.000	90,80
c	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Bidang Ekonomi	564.500.000	561.251.875	99,42
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.280.500.000	1.148.587.450	89,70
a	Penyusunan Rancangan RPJMD	440.000.000	422.728.000	96,07
b	Penyusunan Rancangan RKPD	72.500.000	45.086.250	62,19
c	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	353.000.000	326.260.200	92,42
d	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	170.000.000	142.112.000	83,60
e	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	45.000.000	33.008.000	73,35
f	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	80.000.000	74.703.000	93,38
g	Review Dokumen RPJPD	120.000.000	104.690.000	87,24
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	866.460.000	797.502.000	92,04
a	Review Masterplan Agropolitan Seroja	200.000.000	189.159.000	94,58
b	Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang	200.000.000	196.650000	98,33
c.	Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian	122.500.000	118.695.000	96,89
d.	Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang	343.960.000	292.998.000	85,18
7	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	211.500.000	205.745.000	97,28
a	Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial	161.500.000	159.000.000	98,45
b	Penguatan kelembagaan Pengarustaaan Gender dan Anak	50.000.000	46.745.000	93,49

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
8	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	2.189.250.000	1.991.654.975	90,97
a	Penyusunan kajian/Masterplan Rencana Induk Infrastuktur	486.340.000	463.697.200	95,34
b	Penyusunan Rencana Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan	238.000.000	214.224.450	90,01
c	Survey dan Pemataan	15.000.000	14.890.000	99,27
d	Penyusunan Rencana Tata Ruang	521.800.000	441.145.270	84,54
e	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	578.110.000	529.715.055	91,63
f	Penyusunan Masterplain Smart City	350.000.000	328.283.000	93,80
9	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	721.460.000	626.387.620	86,82
a	Fasilitasi IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management Irigation Program)	244.620.000	204.732.570	83,69
b	Fasilitasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah	69.550.000	52.335.000	75,25
c	Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL	209.570.000	187.913.550	89,67
d	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000	9.985.000	66,57
e	Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	182.720.000	171.421.500	93,82
10	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI BIDANG EKONOMI	197.700.000	137.649.000	69.63
a	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	77.700.000	57.363.000	73,83
b	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	70.000.000	50.411.000	72,01
c	Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	50.000.000	29.875.000	59,75
11	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	212.750.000	200.382.900	94,19
a	Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat	128.750.000	125.983.500	97,85
b	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	10.000.000	3.749.400	37,49
c	Fasilitasi dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	26.500.000	25.750.000	97,17

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
d	Fasilitasi dan koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup	47.500.000	44.900.000	94,53
12	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	195.000.000	177.054.000	90,80
a	Kajian Disparitas Antar Wilayah	195.000.000	177.054.000	90,80
	Jumlah Semua	8.742.652.000	7.869.890.551	90,02

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Bidang dalam rangka Pencapaian target Relaisasi haus sesuai dengan Time Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran., agar penerapan penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja pada Semester II sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi SAKIP, terutama untuk tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan mendorong untuk memiliki Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1(satu) target sasaran stratejik yang ditetapkan, 4 (empat) Indikator kinerja berhasil diwujudkan dengan baik. keberhasilannya namun masih ada kendala yang disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Belum terkoneksi aplikasi ysng satu dengan Aplikasi yang lain untuk memudahkan membuat laporan dan Kinerja Pemerintah
 - b. Masih Lemahnya perencanaan pada RPJMD
 - c. Terdapat perubahan peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja sehingga mempengaruhi jumlah SKPD

Lumajang, 18 Januari 2019

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG

Ir. NUGROHO DWI ATMOKO
Pembina Utama Muda
NIP. 19631116 199003 1 006